



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026**  
**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : H. Muhammad Syirajudin, SH., M.T  
Jabatan : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Prov. Kaltim  
selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Sri Wahyuni  
Jabatan : Sekretaris Daerah Prov. Kaltim  
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

**PIHAK KEDUA** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian sanksi berupa:

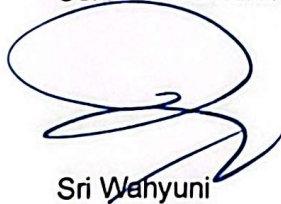
- a. Berdasarkan Nilai SAKIP:
  1. Predikat CC dikenakan pemotongan TPP sebesar 50%.
  2. Predikat C dikenakan pemotongan TPP sebesar 70%.
  3. Predikat D dikenakan pemotongan TPP sebesar 80%.
- b. Berdasarkan Capaian Kinerja yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja:

Tambahan pemotongan TPP sebesar 10% bagi Kepala Perangkat Daerah yang tidak mencapai target.

Adapun mekanisme pemotongan berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur tentang Tata Cara Pemberian, Pemotongan, Penghentian Tambahan Penghasilan Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

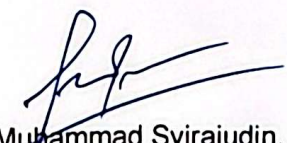
Samarinda, 09 Februari 2026

**PIHAK KEDUA,**  
Sekretaris Daerah,



Sri Wahyuni

**PIHAK PERTAMA,**  
Asisten Pemerintahan dan  
Kesejahteraan Rakyat,



H. Muhammad Syirajudin, SH., M.T  
Pembina Utama Madya (IV/d)  
NIP 196602081987011003

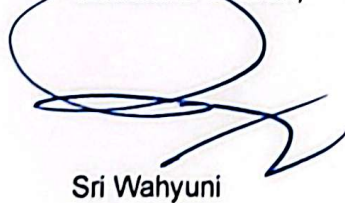
**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026**  
**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Skor EKPPD	3,48
2.	Meningkatnya Kualitas Rancangan Produk Hukum Daerah, Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Indeks Reformasi Hukum	91,00
		Nilai Capaian aksi HAM	70,00
3.	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Indeks Kualitas Kebijakan Bidang Kesra	60,00
4.	Meningkatnya Akses dan Capaian Pendidikan Tinggi di Kalangan Penduduk Usia Produktif	Persentase penduduk usia >15 tahun yang sedang menempuh pendidikan tinggi	80,00

	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp 2.483.603.145	APBD
2.	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Rp 6.017.419.925	APBD
3.	Program Kesejahteraan Rakyat	Rp 1.615.017.769.499	APBD
4.	Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Rp 1.837.107.020	APBD

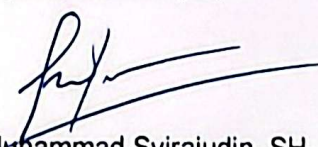
Samarinda, 09 Februari 2026

**PIHAK KEDUA,**  
Sekretaris Daerah,



Sri Wahyuni

**PIHAK PERTAMA,**  
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat,



H. Muhammad Syirajudin, SH., M.T  
Pembina Utama Madya (IV/d)  
NIP 196602081987011003